

- a. Organisasi Perangkat Daerah
Pelaksana fungsi kewilayahan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Jakarta Selatan
- b. Program dan Kegiatan

Program Fungsi Penunjang

SKPD : Kota Administrasi Jakarta Selatan

No	Kode Program	Program	Jumlah Kegiatan		
			Setko	Kecamatan	Kelurahan
1	4.01.15	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan	20	122	781
2	4.01.16	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan	3	30	195
3	4.01.40	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	46	--	--
4	4.01.41	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	--	60	571
5	4.01.42	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	12	20	362
Jumlah Kegiatan			81	232	1909

Capaian Kegiatan Fungsi Penunjang

No	SKPD dan Program	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
1	Sekretariat Kota Adm.	81	78	96,30
2	Kecamatan Kota Adm.	232	229	98,71
3	Kelurahan Kota Adm.	1909	1846	96,70
Jumlah		2222	2153	96,89

c. **Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional**

(termasuk pegawai pada kecamatan dan kelurahan per 31 Desember 2019)

Tabel 3.152 **Rekapitulasi Pegawai Walikota Jakarta Selatan**

No	Kualifikasi	SKPD	Jumlah
		WJS	
A.	Golongan		1.008
	1. Golongan IV		76
	2. Golongan III		758
	3. Golongan II		149
	4. Golongan I		25
B.	Eselon		1.008
	1. Eselon I		0
	2. Eselon II		3
	3. Eselon III		34
	4. Eselon IV		404
	5. Eselon V		0
	6. Fungsional		0
	7. Pelaksana		568
C.	Pendidikan		1.008
	1. S3		0
	2. S2		141
	3. S1		497
	4. Diploma		111
	5. SLTA		220
	6. SLTP		30
	7. SD		9

Pejabat yang memenuhi persyaratan (per 31 desember 2019, termasuk pada kecamatan dan kelurahan):

Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural Pelaksana Fungsi Penunjang

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jumlah Terisi	Kesesuaian		
				Pendidikan	Diklatpim	Pangkat
1	Eselon II.a	1	1	1	1	1
2	Eselon II.b	2	2	2	1	2
3	Eselon III.a	13	13	13	12	13
4	Eselon III.b	21	21	21	17	21
5	Eselon IV.a	119	118	118	67	118
6	Eselon IV.b	290	285	285	42	285
	Jumlah	446	440	440	140	440

d. **Alokasi dan realisasi anggaran**

Pada Tabel disajikan alokasi dan realisasi anggaran fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan Tahun Anggaran 2019.

Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Fungsi Kewilayahan Pada WJS

URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Fungsi Kewilayahan			
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	414.386.182.000	406.561.976.555	98,11
2. BELANJA LANGSUNG			
a. BELANJA PEGAWAI	250.000.000	242.500.000	97,00
b. BELANJA BARANG DAN JASA	768.921.972.979	725.420.152.453	94,34
- Belanja Pemeliharaan			
c. BELANJA MODAL	133.808.213.979	30.638.231.683	22,90

e. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sikronisasi Perencanaan Program

No	SKPD/Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1.	WJS			
	• RKPD 2019	5	RKPD : RENJA SKPD	100
	• RENJA SKPD 2019	5	RENJA SKPD : RKA	100
	• RKA 2019	5	RKA : DPA	100
	• DPA 2019	5	DPA	100

f. Sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana yang digunakan dalam Fungsi Penunjang. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian tercatat dalam Daftar Barang Inventaris. Beberapa jenis dan bentuk sarana dan prasarana yang digunakan adalah sebagai berikut.

Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Urusan Fungsi Penunjang

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah
1.	Papan Pengumuman	1
2.	Kotak Pengaduan	2
3.	Leaflet	1 Jenis (Kompak)

No	Jenis Fasilitas/ Prasarana	Jumlah
4.	Mobil Keliling	1 unit
5.	Media Masa/Sosial	Facebook : PemkotJakartaSelatan Instagram : @kominfotikjs Twitter : @kotajaksel Youtube : Kominfotik Jaksel
6.	Website	Selatan.jakarta.go.id
7.	E-mail	kominfomasis@jakarta.go.id
8.	Call Center	
9.	Kursi Difabel	2

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi WJS dalam menjalankan tugas pengelolaan aset daerah antara lain:

1. Masih adanya perbedaan dokumen dan fisik aset yang ada di UKPD WJS dan status aset tanah milik Pemrov DKI Jakarta yang belum bersertifikat
2. Masih adanya aset yang tercantum pada KIB A s.d. KIB F yang belum ditemukan
3. Sistem SIERA yang ada belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan aset lainnya yang ada di BPAD
4. Mekanisme Penghapusan Gedung dan Bangunan yang belum jelas
5. Pencatatan Ganda dalam KIB Tanah dan Bangunan

Dalam menghadapi permasalahan tersebut upaya solusi yang dilakukan WJS antara lain:

1. Solusi Poin 1 :
 - Perlunya WJS memberikan saran evaluasi Sensus BMD Tahun 2018, sehingga tercipta kondisi aset yang jelas keberadaan dan dokumen kelengkapannya, dan ter-update KIB A s.d. KIB F dalam sistem SIERA
 - Koordinasi dengan UKPD yang memiliki aset tanah tersebut untuk diusulkan ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan via Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Jakarta Selatan
2. Solusi Poin 2 :

Untuk barang yang tidak ditemukan beberapa kondisi :

 - Barang yang masa manfaatnya sudah habis, setelah dilakukan inventarisasi ulang namun tidak ditemukan, bisa diajukan masuk ke majelis penetapan status aset
 - Barang yang masa manfaatnya masih ada, dilakukan penelusuran barang tersebut, jika memang barang tersebut tidak ditemukan fisiknya maka membuat surat keterangan kepolisian
3. Solusi Poin 3 :
 - Perlunya WJS memberikan saran agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMD dan memiliki sistem pengelolaan BMD dengan peruntukan yang beda harus bersinergi dan memiliki komitmen yang sama untuk pengintegrasian sistem pengelolaan BMD yang ada
4. Solusi Poin 4 :
 - Koordinasi dengan Pengurus Barang dan Suban Pengelolaan Aset

- Sebaiknya Gedung dan Bangunan yang lama sudah dihapuskan dengan pengajuan usul penghapusan, sehingga jika datang Gedung dan Bangunan yang baru tidak terjadi pencatatan ganda gedung dalam satu KIB di UKPD
5. Solusi Poin 5 :
- Koordinasi Pengurus Barang antara kedua belah pihak yang double catat
 - Peninjauan lapangan terhadap lokasi yang double catat
 - Melihat dokumen yang dipunya antara kedua belah pihak yang double catat (dokumen seperti KIB, Sertifikat, dan lain-lain)
 - Jika salah satu pihak sudah diyakini dokumennya sehingga salah satu pihak yang tidak mempunyai dokumen, maka dikoreksi pengurangan pencatatan
- h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Penghargaan/Juara Lomba Tingkat Nasional yang diraih
Kota Administrasi
pada Tahun 2019

No	Prestasi/ Penghargaan	Tingkat	Unit/Organisasi yang Mengeluarkan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyuluh Pertanian Berprestasi	Nasional	Kementerian Pertanian	Sudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
2	Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2019 (A-)	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
3	Juara 1/Liga Sepakbola Pelajar U14	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kecamatan Kebayoran Baru
4	Pakart madya II- Pelaksana terbaik usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK Kategori Kota Tahun 2019	Nasional	Tim penggerak PKK Pusat	Kelurahan Menteng Atas
5	Juara I Komite Putra Sabuk Kuning -35 Kg	Nasional	KOP Karate Universitas Negeri Jakarta	SDN Gunung 01 (Azriel Isya Fahyumi)
6	Juara II SD Kumite -30 Kg Putra	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDN Gunung 01 (Azriel Isya Fahyumi)

7	Juara I U40 Pra Cadet C Putra Pemula	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDN Kramat Pela 01 (Farsha Handranindika)
8	Juara I Kategori Tanding Jakarta Silat Competition	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SDN Cilandak Timur 02 Petang (Fadhil Kurnia Syabana)
9	Juara I U49 Putri Kejuaraan Taekwondo 2nd Menpora Cup 2019	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SMP Negeri 13 (Lintang Ainna M)
10	Juara III Drum Battle Indonesian Drum Corps Championship	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SMP Negeri 13
11	Juara I Usia Dini Kumite -30 Kg Putra Kejurnas Karate Senkaido Championship Menpora Cup 2019	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SD Pelita (Muhammad Ghathaf Aria Suwardi)
12	Juara III Pra Pemula Kumite Perorangan +35 Kg Putra Kejurnas Karate Senkaido Championship Menpora Cup 2019	Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SD Pelita (Muhammad Albarra Aria Suwardi)
13	Juara III Bersama Wingchun Fight Kelas 60 Kg Putra Kejurnas Aliansi Wingchun Indonesia 2019	Nasional	FORMI/AKTI	SMAN 37 (Aditya Arif Pratama)
14				

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

PROVINSI DKI JAKARTA
NAMA SKPD WJS
URUSAN YANG DILAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Satuan elemen data	LPPD 2019		CATATAN KLARIFIKASI		
								Elemen Data	Capaian Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7	7	10	11	12		
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian / LPNK	1	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (di luar program non teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (di luar program non teknis	Sebutkan program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (diluar program non teknis) dan nilai anggaran beserta realisasi	program	5	5			
							program					
							apabila ada sebutkan SOP	buah	234	234		
							SOP #1	Jenis SOP	Perda			
							SOP #2	Jenis SOP	Perda			
2	KETAATAN THD PERATURAN / UU	Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	3	Keberadaan peraturan (perda/perkada) yg berkaitan dengan penyelenggaraan urusan	ada / tidak ada	apabila ada sebutkan perda / perkada nomor , tanggal , tentang	Jab Fungsional	tidak	tidak			
							Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	orang	440	98.65		
							Jumlah jabatan yang harus ada	orang	446			
							Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	orang	0	tidak		
							3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #2 3. Jabatan Fungsional #3 4. Jabatan Fungsional #4 5. Jabatan Fungsional #5
Jab Fungsional												
Jab Fungsional												
Jab Fungsional												
Jab Fungsional												
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS PD terhadap total PNS Provinsi	Jumlah PNS PD	ada/tidak	1007	tdi			
						Jumlah PNS Provinsi	ada/tidak					
						Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan sesuai penjenjangan	program	440	100.00		
7	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat PD yang ada x 100%	Jumlah pejabat PD yang ada	Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan	program	440	100.00				
						program	440	100.00				
						program	440	100.00				
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh PD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh PD -RENSTRA-SKPD -RENJA-SKPD -RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan PD berikut jumlahnya	-RENSTRA-SKPD	program	7				
						-RENJA-SKPD	Rp	788,756,744,447				
						-RKA-SKPD	Rp	974,918,032,336				
						Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja PD	Rp	763,007,981,019	96.74		
						Jumlah program RENJA PD yg ditetapkan dalam RPJMD	Jumlah program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD	Rp	788,756,744,447	80.90		
10	11	Sinkronisasi program RKA PD dengan Program Renja PD	Jumlah program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD	Jumlah program RENJA PD yang diakomodir dalam RKA PD dibagi jumlah program dalam RKA PD x 100%	Jumlah program RKA PD yang diakomodir dalam DPA PD	Jumlah program RKA PD	Rp	974,918,032,336				
						Jumlah program RKA PD yang diakomodir dalam DPA PD	Rp	972,420,188,764	99.74			
						Jumlah program dalam DPA PD	Rp	974,918,032,336				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran PD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran PD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran belanja PD (Rp)	Rp		tdi			
						Total anggaran belanja APBD (Rp)	Rp					
						Realisasi belanja PD terhadap total realisasi belanja APBD	Realisasi belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	Rp		tdi		
						Realisasi belanja APBD (Rp)	Rp					
						Besaran belanja Langsung dan Tidak Langsung	Total belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total belanja langsung dari total belanja PD x 100%	Realisasi belanja lagsung PD (Rp)	Rp		tdi
						Realisasi belanja PD (Rp)	Rp					
						Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja tidak langsung dari total belanja perangkat daerah	Total belanja tidak langsung dari total belanja PD x 100%	Realisasi belanja tidak lagsung PD (Rp)	Rp		tdi
Realisasi belanja PD (Rp)	Rp											
14	15	Laporan keuangan PD	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset PD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset PD	Jumlah komponen laporan keuangan	ada/tidak	3	3			
						- Neraca	ada/tidak	ada				
						- LRA	ada/tidak	ada				
16	17	Manajemen asset PD	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset PD	ada atau tidak ada laporan inventarisasi barang / asset PD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset PD	- CALK	ada/tidak	ada	ada			
						ada/tidak	ada	ada				
						ada/tidak	ada	ada				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penggunaan asset PD	18	Jumlah aset yg tidak digunakan oleh PD	Jumlah aset yang tidak digunakan PD dibagi total aset yang dikuasai PD x 100%	Jumlah aset yang tidak digunakan PD	ada/tidak		tdi			
						Total Asset yang dikuasai PD						
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk - bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di media massa/media sosial 6. Website 7. Email 8. Call Center 9. Kursi Difabel	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	8	8				
						1. Papan Pengumuman	ada					
						2. Pos Pengaduan	ada					
						3. Leaflet	ada					
						4. Mobil keliling	tidak					
						5. Pengumuman di media massa/media sosial	ada					
						6. Website	ada					
						7. Email	ada					
						8. Call Center	ada					
						9. Kursi Difabel	ada					
21	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada/tidak surat ketetapan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	ada	ada					
						ada	ada					

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

MAT IKK UNTUK PROVINSI

PROVINSI DKI JAKARTA
NAMA SKPD WJS (BPAD)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG

No	ASPEK	FOKUS	No IKK	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Satuan elemen data	LPPD 2019		CATATAN KLARIFIKASI
								Elemen Data	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	7	10	11	12
1	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset PD	18	ada atau tidak ada inventarisasi barang / asset PD	ada/tidak ada laporan inventarisasi barang/asset PD	ada/tidak	ada/tidak		tdi	
		Penggunaan asset PD	19	Jumlah aset yg tidak digunakan oleh PD	Jumlah asset yang tidak digunakan PD dibagi total asset yang dikuasai PD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan PD Total Asset yang dikuasai PD	ada/tidak		tdi	